



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.

NIP. 19760417 199903 2 007

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI
JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen *Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja Perubahan ini merupakan penyesuaian terhadap Renja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang direncanakan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan strategis di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari unsur internal dinas, perangkat daerah terkait, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Masukan dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam penyempurnaan rencana kerja yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Harapan kami, dokumen Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025, sekaligus menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar , 2025
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-3
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
	1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERMADES TAHUN 2025 TRIWULAN I	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPERMADES Tahun 2025 Triwulan I	II-1
	2.2. Analisis Kinerja DISPERMADES	II-28
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISPERMADES	II-29
BAB III	PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPERMADES TAHUN 2025	III-1
	3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
	3.2. Program dan Kegiatan	III-2
	3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD	III-8
	3.4. Dana Indikatif	III-9
BAB IV	PENUTUP	IV-1
	4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja	IV-1
	4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra DISPERMADES Tahun 2025...	II-2
Tabel 2.2	Kesesuaian antara Renja DISPERMADES Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025.....	II-11
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja DISPERMADES Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025	II-16
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Triwulan I 2025	II-20
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Triwulan I	II-26
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan–Sasaran Tahun 2025	III-2
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif	III-3
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025	III-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025	II-7
Gambar 2.2	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025	II-9
Gambar 2.3	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025	II-18
Gambar 3.1	Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Dispermades Tahun 2025.....	III-8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat-Daerah).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja OPD adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi unit organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat penggunaanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan OPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja OPD dapat dilihat keefektifan, pertanggungjawaban dan dampak/manfaat dari pelaksanaan kegiatan, serta terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025 adalah :

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan /ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Tersusunnya arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran secara terarah, terpadu dan terkendali sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Tersusunnya alat analisa terhadap target kinerja yang telah ditetapkan secara logis berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan :

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini juga bertujuan sebagai upaya dalam mencapai tingkat capaian kinerja yang maksimal dari penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam

mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah disepakati bersama.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Memuat Latar Belakang dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar hukum, Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES Kabupaten Karanganyar 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penyajian laporan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2025 TRIWULAN I

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (DISPERMADES) Tahun 2025 sampai Triwulan I, yang diuraikan dalam sub bab berikut:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPERMADES Tahun 2025 Triwulan I.

Subbab ini memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja DISPERMADES tahun 2025 sampai Triwulan I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja DISPERMADES

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan

DISPERMADES berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DISPERMADES, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISPERMADES
- Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di DISPERMADES untuk ditindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERMADES TAHUN 2025

TRIWULAN I

Evaluasi Rencana Kerja DISPERMADES Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan di atasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPERMADES Tahun 2025 Triwulan I.

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra DISPERMADES Tahun 2024-2026 dengan Renja DISPERMADES Tahun 2025;

Evaluasi terhadap dokumen perencanaan di DISPERMADES untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini bertujuan untuk menjabarkan arah pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kesesuaian antara Renja dan Renstra DISPERMADES 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
2				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
2.13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			18.678.000.000		24.274.451.596	+	5.596.451.596
2.13	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	4.100.000.000	100%	11.076.851.586	+	924.257.988
2.13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	30.000.000	9 dokumen	157.295.000	+	16.000.000
2.13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	1 dokumen	50.000.000	+	50.000.000
2.13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.000.000	-	4.000.000
2.13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.000.000	-	4.000.000
2.13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.000.000	-	4.000.000
2.13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.000.000	-	4.000.000
2.13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	10.000.000	4 laporan	102.560.000	+	92.560.000
2.13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dokumen keuangan	1 dokumen	3.308.000.000	1 dokumen	4.914.833.478	+	1.606.833.478
2.13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	3.308.000.000	40 orang	4.914.833.478	+	1.606.833.478
2.13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	30.000.000	100%	10.000.000	-	20.000.000
2.13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 orang	30.000.000	14 orang	10.000.000	-	20.000.000
2.13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	100%	233.000.000	100%	245.837.033	+	12.837.033

2.13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	5.000.000	12 paket	4.000.000	-	1.000.000
2.13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	70.000.000	3 paket	122.397.000	+	52.397.000
2.13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	15.000.000	12 paket	15.000.000	=	0
2.13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,12 dokumen	4.000.000	2,12 dokumen	3.440.000	-	560.000
2.13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	134.000.000	12 laporan	100.000.000	-	34.000.000
2.13	01	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.000.000	-	4.000.000
2.13	01	2.07		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	100.000.000	100%	5.325.000.000	+	5.225.000.000
2.13	01	2.07	0001	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedinya Gedung Kantor Yang Baik	1 Unit	100.000.000	1 Unit	5.300.000.000	+	5.200.000.000
2.13	01	2.07	0007	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Lainnya yang disediakan	3 Unit	0	1 Unit	25.000.000	+	25.000.000
2.13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	100 %	152.000.000	100%	169.800.000	=	17.800.000
2.13	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	7.000.000	1 laporan	5.000.000	-	2.000.000
2.13	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	45.000.000	3 laporan	64.800.000	+	19.800.000
2.13	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	100.000.000	3 laporan	100.000.000	=	0
2.13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	43 unit	247.000.000	43 unit	254.086.075	+	7.086.075
2.13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	180.000.000	17 unit	203.722.075	-	23.722.075
2.13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	32.000.000	25 unit	21.264.000	-	11.736.000
2.13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	35.000.000	1 unit	29.100.000	-	5.900.000
2.13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	100 persen	230.000.000	100 persen	195.000.000	-	-35.000.000
					Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	100 persen		100 persen			
2.13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	230.000.000	162 desa	195.000.000	-	-35.000.000
					Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi	1500 unit		1500 unit			

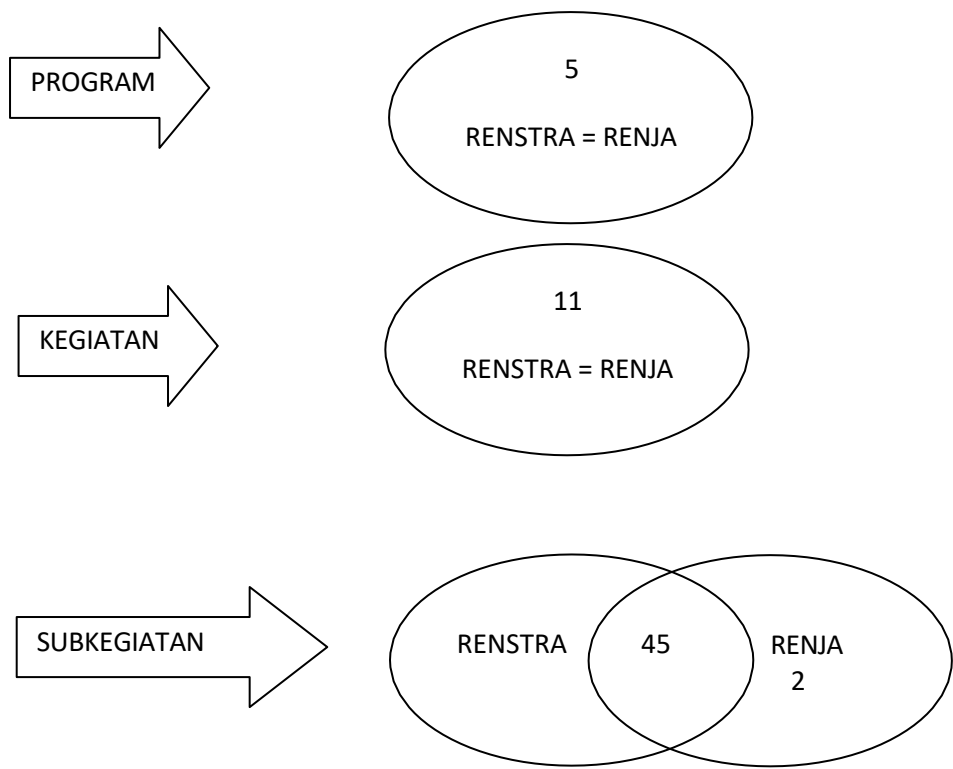
2.13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	85.000.000	162 desa	35.000.000	-	-50.000.000
2.13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1500 unit	145.000.000	1.500 unit	160.000.000	+	15.000.000
2.13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	95 dokumen	200.000.000	95 dokumen	95.000.000	-	-105.000.000
2.13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi	3 dokumen	200.000.000	3 dokumen	95.000.000	-	-105.000.000
2.13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	40.000.000	-	-35.000.000
2.13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	25.000.000	-	-25.000.000
2.13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	30.000.000	-	-45.000.000
2.13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 persen	6.200.000.000	100 persen	4.140.000.000	-	-2.060.000.000
					Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	84 persen		84 persen			
2.13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	162 desa	6.200.000.000	162 desa	4.140.000.000	-	-2.060.000.000
					Jumlah desa tertib pengelolaan aset	162 desa		162 desa		=	
					Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa	1 desa		1 desa		=	
2.13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	341.000.000	1 dokumen	100.000.000	-	-141.000.000
2.13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	150.000.000	+	100.000.000
2.13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	234.000.000	1 dokumen	100.000.000	-	-134.000.000
2.13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	3.250.000.000	2 dokumen	3.210.000.000	-	-40.000.000
2.13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	486 orang	500.000.000	162 orang	25.000.000	-	-475.000.000

2.13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	250.000.000	2 laporan	25.000.000		-225.000.000
2.13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	25.000.000	-	-75.000.000
2.13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	385.000.000	1 dokumen	100.000.000	-	-285.000.000
2.13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	325.000.000	1 laporan	200.000.000	-	-125.000.000
2.13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 laporan	200.000.000	40 laporan	50.000.000	-	-150.000.000
2.13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	25.000.000	-	-25.000.000
2.13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	190.000.000	1 dokumen	70.000.000	-	-120.000.000
2.13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1134 orang	275.000.000	162 orang	50.000.000	-	-225.000.000
2.13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	50.000.000	177 dokumen	10.000.000	-	-40.000.000
2.13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	80 persen	7.938.000.000	80 persen	8.767.600.000	+	829.600.000
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100 persen		100 persen		=	0
2.13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	7.938.000.000	1 kegiatan	8.767.600.000	+	829.600.000
2.13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	207.000.000	1 dokumen	90.000.000	-	-117.000.000

2.13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1lembaga	5.511.000.000	1lembaga	5.437.600.000	-	-73.400.000
2.13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	25.000.000	-	-65.000.000
2.13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	70.000.000	1 laporan	40.000.000	-	-30.000.000
2.13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 laporan	1.050.000.000	5 laporan	2.175.000.000	+	1.125.000.000
2.13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.020.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	-	-20.000.000

Sumber : DISPERMADES, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2025-2026 dengan Renja Tahun 2025

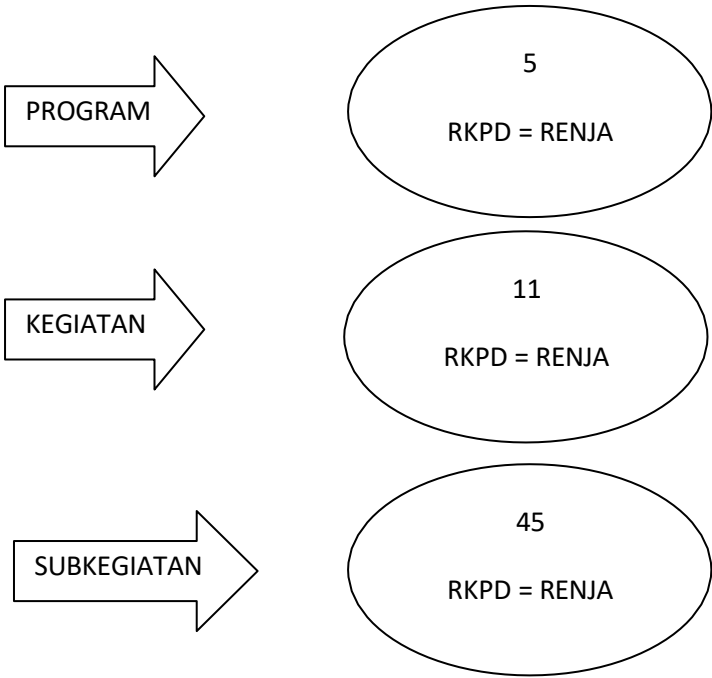
Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
 - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
 - Subkegiatan konsistensi sebesar : $(47/45) \times 100\% = 100\%$ (Terdapat 2 Subkegiatan dalam Renja yang tidak terdapat dalam Renstra.
- 2 subkegiatan yang tidak terdapat dalam renstra, ada dalam Renja 2025 adalah :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, karena tahun 2025 Bupati dan Wakil Bupati sudah terpilih dimana daerah harus membuat RPJMD, dan OPD secara langsung membuat Rencana Strategis yang mengacu kepada RPJMD yang baru.
 - b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dikarenakan kendaraan dinas operasional roda dua yang ada masih kurang memadai dan kendaraan yang ada sudah terlalu tua usianya
- 2) Kesesuaian indikator dan target
- Keseluruhan indikator maupun target antara Renstra dan Renja 2025 sudah sesuai.
- 3) Kesesuaian alokasi anggaran
- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan ada beberapa mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.24.274.451.596,- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra Rp.18.678.000.000,-. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja dalam pembangunan Gedung yang belum jadi dilaksanakan di tahun 2024, rencananya akan dilaksanakan di tahun 2025. Hal ini juga dipengaruhi Pagu Indikatif dalam Renja lebih mendekati kondisi riil dan sesuai kemampuan keuangan daerah maupun alokasi dana bagi DISPERMADES;
 - Perbedaan Pagu Indikatif dalam Renstra dan dalam Renja terjadi penambahan alokasi terbesar di subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang bertambah Rp.5.200.000.000,- (di Renja lebih besar daripada Renstra 2025), sedangkan pengurangan terbanyak pada di subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa = Rp.475.000.000,- (di Renja lebih sedikit dari pada Renstra tahun 2025).

2.1.1. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja DISPERMADES Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di DISPERMADES untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DISPERMADES dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

- 1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - o Program konsistensi sebesar 100% (5 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);

- Kegiatan konsistensi sebesar 100% (10 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
 - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (40 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
- Keseluruhan indikator antara RKPD dan Renja sudah sesuai.
3. Kesesuaian alokasi anggaran
- Keseluruhan alokasi anggaran antara RKPD dan Renja 2025 sudah sesuai

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja DISPERMADES Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD 2025		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target Kinerja	Pagu indikatif Rp.	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
2				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
2.13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			24.274.451.596		24.274.451.596	=	0
2.13	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	11.076.851.586	100%	11.076.851.586	=	0
2.13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	157.295.000	9 dokumen	157.295.000	=	0
2.13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	=	0
2.13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	0
2.13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	0
2.13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	0
2.13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	0
2.13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	102.560.000	4 laporan	102.560.000	=	0
2.13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dokumen keuangan	1 dokumen	4.914.833.478	1 dokumen	4.914.833.478	=	0
2.13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	4.914.833.478	40 orang	4.914.833.478	=	0

2.13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	10.000.000	100%	10.000.000	=	0
2.13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	10.000.000	14 orang	10.000.000	=	0
2.13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	100%	245.837.033	100%	245.837.033	=	0
2.13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	4.000.000	12 paket	4.000.000	=	0
2.13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	122.397.000	3 paket	122.397.000	=	0
2.13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	15.000.000	12 paket	15.000.000	=	0
2.13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,12 dokumen	3.440.000	2,12 dokumen	3.440.000	=	0
2.13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	=	0
2.13	01	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	=	0
2.13	01	2.07		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	5.325.000.000	100%	5.325.000.000	=	0
2.13	01	2.07	0001	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedinya Gedung Kantor Yang Baik	1 Unit	5.300.000.000	1 Unit	5.300.000.000	=	0
2.13	01	2.07	0007	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Lainnya yang disediakan	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	=	0
2.13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	169.800.000	100%	169.800.000	=	0
2.13	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	=	0
2.13	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	64.800.000	3 laporan	64.800.000	=	0
2.13	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	100.000.000	3 laporan	100.000.000	=	0
2.13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	43 unit	254.086.075	43 unit	254.086.075	=	0
2.13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	203.722.075	17 unit	203.722.075	=	0
2.13	01	2.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	21.264.000	25 unit	21.264.000	=	0
2.13	01	2.08	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	29.100.000	1 unit	29.100.000	=	0

2.13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	100 persen	195.000.000	100 persen	195.000.000	=	0
					Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	100 persen		100 persen			
2.13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	195.000.000	162 desa	195.000.000	=	0
					Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi	1500 unit		1500 unit			
2.13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	35.000.000	162 desa	35.000.000	=	0
2.13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1.500 unit	160.000.000	1.500 unit	160.000.000	=	0
2.13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	95 dokumen	95.000.000	95 dokumen	95.000.000	=	0
2.13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi	3 dokumen	95.000.000	3 dokumen	95.000.000	=	0
2.13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	=	0
2.13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	=	0
2.13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	=	0
2.13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 persen	4.140.000.000	100 persen	4.140.000.000	=	0
					Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	84 persen		84 persen			
2.13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	162 desa	4.140.000.000	162 desa	4.140.000.000	=	0
					Jumlah desa tertib pengelolaan aset	162 desa		162 desa		=	
					Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa	1 desa		1 desa		=	
2.13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	=	0

2.13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	150.000.000	4 dokumen	150.000.000	=	0
2.13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	=	0
2.13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	3.210.000.000	2 dokumen	3.210.000.000	=	0
2.13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	25.000.000	162 orang	25.000.000	=	0
2.13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	25.000.000	2 laporan	25.000.000	=	0
2.13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	=	0
2.13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	=	0
2.13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	=	0
2.13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 laporan	50.000.000	40 laporan	50.000.000	=	0
2.13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	=	0
2.13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	70.000.000	=	0
2.13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	50.000.000	162 orang	50.000.000	=	0
2.13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	10.000.000	177 dokumen	10.000.000	=	0
2.13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	80 persen	8.767.600.000	80 persen	8.767.600.000	=	0

					Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100 persen		100 persen		=	0
2.13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	8.767.600.000	1 kegiatan	8.767.600.000	=	0
2.13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	90.000.000	=	0
2.13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	5.437.600.000	1 lembaga	5.437.600.000	=	0
2.13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	=	0
2.13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	40.000.000	1 laporan	40.000.000	=	0
2.13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 laporan	2.175.000.000	5 laporan	2.175.000.000	=	0
2.13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	=	0

Sumber : DISPERMADES, 2025

2.1.2. Hubungan antara Renja DISPERMADES Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di DISPERMADES untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DISPERMADES dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

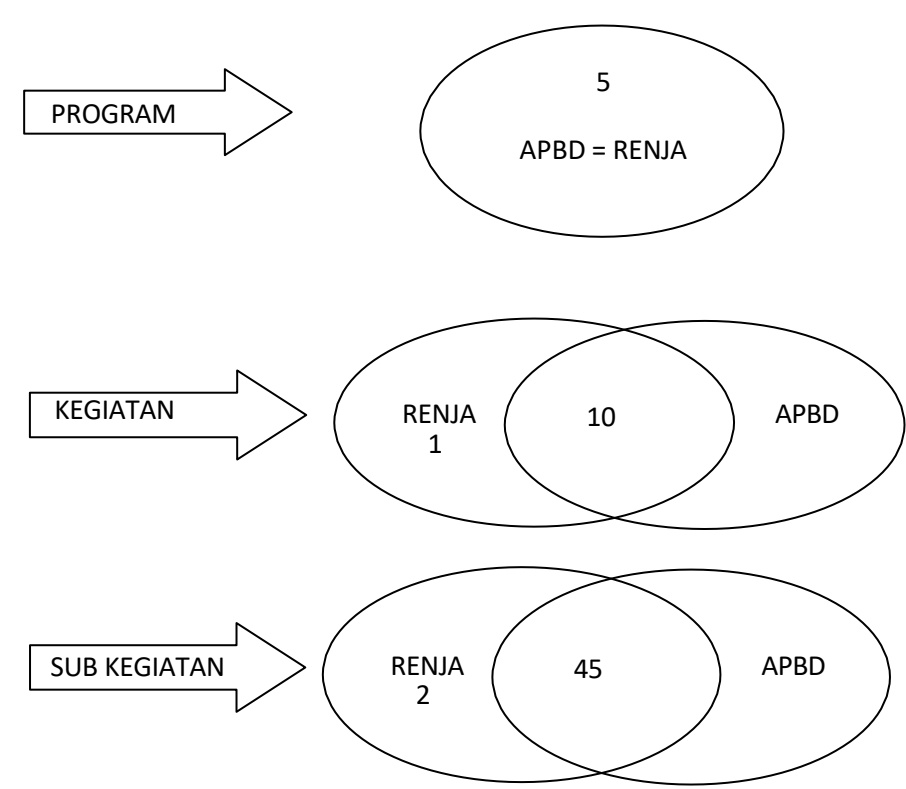
NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif	Pagu	
					Rp.	Rp.	
1				2	3	4	5
2				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
2.13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.274.451.596	19.322.951.586	80%
2.13	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.076.851.586	6.075.351.586	-55%
2.13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.295.000	156.560.000	99%
2.13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	100%
2.13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.000.000	1.000.000	100%
2.13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100%
2.13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100%
2.13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100%
2.13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.560.000	102.560.000	100%
2.13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.914.833.478	5.213.333.478	106%
2.13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.914.833.478	5.213.333.478	106%
2.13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100%
2.13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	100%
2.13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.837.033	270.878.433	112%
2.13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	4.000.000	100%
2.13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.397.000	146.703.433	120%
2.13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100%
2.13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.440.000	3.440.000	100%
2.13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	100.000.000	100%
2.13	01	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000	1.735.000	173%
2.13	01	2.07		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.325.000.000	0	
2.13	01	2.07	0001	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.300.000.000	0	
2.13	01	2.07	0007	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	0	
2.13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.800.000	169.800.000	100%

2.13	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	5.000.000	100%
2.13	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	64.800.000	64.800.000	100%
2.13	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100.000.000	100.000.000	100%
2.13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	254.086.075	254.779.675	100%
2.13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203.722.075	204.415.675	100%
2.13	01	2.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.264.000	21.264.000	100%
2.13	01	2.08	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.100.000	29.100.000	100%
2.13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	195.000.000	195.000.000	100%
2.13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	195.000.000	195.000.000	100%
2.13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	35.000.000	35.000.000	100%
2.13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	160.000.000	160.000.000	100%
2.13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	95.000.000	95.000.000	100%
2.13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	95.000.000	95.000.000	100%
2.13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	100%
2.13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100%
2.13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	30.000.000	30.000.000	100%
2.13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.140.000.000	4.190.000.000	101%
2.13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.140.000.000	4.190.000.000	101%
2.13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100.000.000	100.000.000	100%
2.13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	150.000.000	150.000.000	100%
2.13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	100.000.000	100.000.000	100%
2.13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.210.000.000	3.260.000.000	101%
2.13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	25.000.000	25.000.000	100%
2.13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	25.000.000	25.000.000	100%
2.13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	25.000.000	25.000.000	100%
2.13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	100.000.000	100.000.000	100%
2.13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	200.000.000	200.000.000	100%
2.13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50.000.000	50.000.000	100%
2.13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	25.000.000	25.000.000	100%
2.13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	70.000.000	70.000.000	100%
2.13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50.000.000	50.000.000	100%
2.13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000	10.000.000	100%
2.13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8.767.600.000	8.767.600.000	100%
2.13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.767.600.000	8.767.600.000	100%
2.13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	90.000.000	90.000.000	100%
2.13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	5.437.600.000	5.437.600.000	100%

2.13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000	25.000.000	100%
2.13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	40.000.000	40.000.000	100%
2.13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2.175.000.000	2.175.000.000	100%
2.13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000	1.000.000.000	100%

Sumber : DISPERMADES, 2025

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :



Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

- Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
 - Konsistensi Kegiatan sebesar = $(10/11) \times 100\% = 91\%$ terdapat 1 kegiatan dalam Renja yang tidak ada dalam APBD yaitu Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Konsistensi Subkegiatan sebesar = $(45/47) \times 100\% = 96\%$; terdapat 2 Subkegiatan dalam Renja yang tidak ada dalam APBD yaitu : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Kesesuaian indikator dan target

- Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan

3. Kesesuaian alokasi anggaran

- Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp.24.274.451.596,- sedangkan dalam APBD sebesar Rp.19.322.951.586,- ada penurunan sebesar Rp.4.951.500.010.- atau (20%);

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Triwulan I 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik
						Target Kinerja	Pagu	Rp.	%	
							Rp.			
1				2	3	4	5	6	7	8
2				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2.13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			19.322.951.596	2.722.927.646	14%	14%
2.13	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	6.075.351.000	1.420.839.528	23%	23%
2.13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	156.560.000	48.455.000	31%	31%
2.13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	50.000.000	0	0%	0%
2.13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1.000.000	100%	100%
2.13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	0	0%	0%
2.13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1.000.000	100%	100%
2.13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	0	0%	0%
2.13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	102.560.000	46.455.000	45%	45%
2.13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dokumen keuangan	1 dokumen	5.213.333.478	1.260.511.383	24%	24%
2.13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	5,213.333.478	1.260.511.383	24%	24%
2.13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	10.000.000	9.937.000	99%	99%
2.13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	10.000.000	9.937.000	99%	99%

2.13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	100%	270.878.433	36.607.930	13%	13%
2.13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	4.000.000	883.000	22%	22%
2.13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	146.703.433	7.391.750.	5%	5%
2.13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	15.000.000	3.075.000	20%	20%
2.13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,12 dokumen	3.440.000	1.460.000	42%	42%
2.13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	22.886.180	23%	23%
2.13	01	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.735.000	912.000	52%	52%
2.13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	169.800.000	28.359.855	11%	11%
2.13	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	1.386.950	28%	28%
2.13	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	64.800.000	3.884.505	6%	6%
2.13	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	100.000.000	23.088.400	23%	23%
2.13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	43 unit	254.779.675	36.968.260	14%	14%
2.13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	204.415.675	35.458.260	17%	17%
2.13	01	2.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	21.264.000	1.260.000	6%	6%
2.13	01	2.08	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	29.100.000	250.000	1%	1%
2.13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	100 persen	195.000.000	19.452.378	10	10
					Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	100 persen				

2.13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	195.000.000	19.452.378	10%	10%
					Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi	1500 unit				
2.13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	35.000.000	0	0%	0%
2.13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1.500 unit	160.000.000	19.452.378	12%	12%
2.13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	95 dokumen	95.000.000	13.557.300	14%	14%
2.13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi	3 dokumen	95.000.000	13.557.300	14%	14%
2.13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	40.000.000	10.494.500	42%	42%
2.13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000	2.484.600	0%	0%
2.13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	30.000.000	578.200	2%	2%
2.13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 persen	4.190.000.000	836.390.097	20%	20%
					Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	84 persen				
2.13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	162 desa	4.190.000.000	836.390.097	20%	20%
					Jumlah desa tertib pengelolaan aset	162 desa				
					Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa	1 desa				
2.13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	100.000.000	7.389.300	7%	7%
2.13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	150.000.000	0	0%	0%
2.13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	100.000.000	59.430.300	59%	59%
2.13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	3.260.000.000	707.432.490	22%	22%
2.13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	25.000.000	0	0%	0%

2.13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	25.000.000	1.671.450	7%	7%
2.13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	25.000.000	0	0%	0%
2.13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	100.000.000	10.256.457	10%	10%
2.13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	200.000.000	2.998.500	1%	1%
2.13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 laporan	50.000.000	6.618000	13%	13%
2.13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 dokumen	25.000.000	20.672.000	83%	83%
2.13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	70.000.000	15.713.100	22%	22%
2.13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	50.000.000	1.431.500	29%	29%
2.13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	10.000.000	2.777.000	27%	27%
2.13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	80 persen	8.767.600.000	432.688.343	5%	5%
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100 persen				
2.13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	8.767.600.000	432.688.343	5%	5%
2.13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	90.000.000	11.100.000	12%	12%
2.13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1lembaga	5.437.600.000	6.411.000	1%	1%
2.13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	25.000.000	117.400	1%	1%

2.13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	40.000.000	1.404.000	2%	2%
2.13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 laporan	2.175.000.000	347.946.700	16%	16%
2.13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.000.000.000	65.709.243	7%	7%

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan DISPERMADES Kabupaten Karanganyar s.d Bulan Juni 2025

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam Triwulan I di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp.2.722.927.646,- atau 14% dengan realisasi fisik sebesar 18%. Untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa realisasi keuangan Rp. 1.420.839.528,- (23%) dengan capaian fisik 25%, dapat dikatakan sementara program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berjalan dengan efektif dan efisien. Program Penataan Desa realisasi anggaran Rp.19.452.378 (10%) sedangkan capaian fisik baru mencapai 12 % . Program Peningkatan Kerjasama Desa realisasi anggaran Rp.13.557.300,- (14%) sedangkan capaian fisik baru mencapai 16%. Program Administrasi Pemerintahan Desa realisasi anggaran Rp.836.390.097,- (20%) sedangkan capaian fisik baru mencapai 21%. Program Pemberdayaan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat realisasi anggaran Rp.432.688.343,- (5%) sedangkan capaian fisik mencapai 20%. Program Pemberdayaan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat realisasi anggaran Rp.432.688.343,- (5%) dikarenakan Insentif Kader Posyandu bulan Januari s.d Maret baru akan diterimakan pada bulan April 2025.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Triwulan I 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
						Target Kinerja	
1				2	3	4	5
2				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
2.13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2.13	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	14%
2.13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	25%
2.13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	0%
2.13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	100%
2.13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0%
2.13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	100%
2.13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	0%
2.13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	45%
2.13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dokumen keuangan	1 dokumen	24%
2.13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	24%
2.13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	99%
2.13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	99%
2.13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	100%	25%
2.13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	22%
2.13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	5%
2.13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	21%
2.13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,12 dokumen	42%
2.13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	23%
2.13	01	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	53%
2.13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	25%
2.13	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	28%

2.13	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	6%
2.13	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	25%
2.13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	43 unit	25%
2.13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	17%
2.13	01	2.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	6%
2.13	01	2.08	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1%
2.13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	100 persen	10%
					Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	100 persen	
2.13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	10%
					Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi	1500 unit	
2.13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	0%
2.13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1.500 unit	12%
2.13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	95 dokumen	15%
2.13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi	3 dokumen	15%
2.13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	26%
2.13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	10%
2.13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	3%
2.13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes sesuai ketentuan	100 persen	20%
					Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	84 persen	
2.13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	162 desa	20%
					Jumlah desa tertib pengelolaan aset	162 desa	10%
					Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa	1 desa	
2.13	04	2.01	0001	Faslitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	7%
2.13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	0%
2.13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	39%
2.13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	22%
2.13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	0%
2.13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	7%
2.13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	0%

2.13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	10%
2.13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	2%
2.13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 laporan	13%
2.13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 dokumen	83%
2.13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	22%
2.13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	3%
2.13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	28%
2.13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	80 persen	20%
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100 persen	10%
2.13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	10%
2.13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	12%
2.13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1lembaga	1%
2.13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	0%
2.13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	4%
2.13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 laporan	16%
2.13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	7%

Sumber Data : Laporan Realisasi Dispermades

2.2 Analisis Kinerja DISPERMADES

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan DISPERMADES berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DISPERMADES, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di DISPERMADES terlihat adanya :

- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Terdapat 1 subkegiatan yang dialokasikan dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam Renja yaitu sub Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa, sehingga dalam renja perubahan perlu ditambahkan.
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu: Rp. 24.274.451.596,- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 19.322.951.596,- ada penurunan sebesar 20,40%.
- Sampai Triwulan I realisasi anggaran baru mencapai 14%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 3 bulan, maka harapannya paling tidak 25%. Hal ini seringkali disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada semester II, dan pelaksanaan subkegiatan efektif mulai berjalan pada bulan Februari 2025.
- Adanya Efisiensi Anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan ada yang tidak bisa dijalankan diawal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISPERMADES

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di DISPERMADES untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi DISPERMADES yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Dispermades;
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.

5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan di desa.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas DISPERMADES juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah desa;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Dispermades;
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja DISPERMADES Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan DISPERMADES diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DISPERMADES
TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja DISPERMADES Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan DISPERMADES diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur;
- 2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Dispermades;
- 3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
- 4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.

3.1. Tujuan dan Sasaran

DISPERMADES pada tahun 2025 sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk melaksanakan tujuan penekan angka kemiskinan dengan sasaran Indeks Desa Membangun.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra DISPERMADES Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indicator dan targetnya.

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran DISPERMADES Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan Naik / turun / =
				Sebelum	Sesudah	
I	Daerah :					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah					
	Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial					
II	DISPERMADES					
1	Tujuan : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.	Angka Kemiskinan	Persen	8,52	8,52	=

2	Sasaran					
	1) Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7098	0,7098	=

Sumber : DISPERMADES, 2025

3.2. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung target dan capaian tujuan dan sasaran DISPERMADES pada tahun 2025 mengacau pada sasaran 1 daerah yaitu Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial dalam pelaksanaannya didukung 5 program, 10 Kegiatan dan 45 Sub kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di DISPERMADES, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada beberapa subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indicator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan DISPERMADES di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu Rp.	Target Kinerja	Pagu Rp.	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
2				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
2.13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			19.322.951.596		19.422.951.596	100.000.000	0,5%
2.13	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	6.075.351.000	100%	6.075.351.000	0	0%
2.13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	156.560.000	9 dokumen	156.560.000	0	0%
2.13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	0	0%
2.13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	0	0%
2.13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	0	0%
2.13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	0	0%
2.13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	0	0%
2.13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	102.560.000	4 laporan	102.560.000	0	0%
2.13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dokumen keuangan	1 dokumen	5.213.333.478	1 dokumen	5.213.333.478	0	0%
2.13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	5,213.333.478	40 orang	5,213.333.478	0	0%
2.13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	10.000.000	100%	10.000.000	0	0%
2.13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	10.000.000	14 orang	10.000.000	0	0%
2.13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	100%	270.878.433	100%	270.878.433	0	0%
2.13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	4.000.000	12 paket	4.000.000	0	0%
2.13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	146.703.433	3 paket	146.703.433	0	0%

2.13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	15.000.000	12 paket	15.000.000	0	0%
2.13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,12 dokumen	3.440.000	2,12 dokumen	3.440.000	0	0%
2.13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	0	0%
2.13	01	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.735.000	1 dokumen	1.735.000	0	0%
2.13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	169.800.000	100%	169.800.000	0	0,0
2.13	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	0	0%
2.13	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	64.800.000	3 laporan	64.800.000	0	0%
2.13	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	100.000.000	3 laporan	100.000.000	0	0%
2.13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	43 unit	254.779.675	43 unit	254.779.675	0	0%
2.13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	204.415.675	17 unit	204.415.675	0	0%
2.13	01	2.08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	21.264.000	25 unit	21.264.000	0	0%
2.13	01	2.08	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	29.100.000	1 unit	29.100.000	0	0%
										0	0%
2.13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	100 persen	195.000.000	100 persen	195.000.000	0	0%
					Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	100 persen		100 persen		0	0%
2.13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	195.000.000	162 desa	195.000.000	0	0%
					Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi	1500 unit		1500 unit		0	0%
2.13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 desa	35.000.000	162 desa	35.000.000	0	0%
2.13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1.500 unit	160.000.000	1.500 unit	160.000.000	0	0%
2.13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	95 dokumen	95.000.000	95 dokumen	95.000.000	0	0%
2.13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi	3 dokumen	95.000.000	3 dokumen	95.000.000	0	0%
2.13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	0	0%
2.13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	0	0%
2.13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	0	0%
2.13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 persen	4.190.000.000	100 persen	4.290.000.000	100.000.000	2,39%
					Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	84 persen		84 persen		0	0%
2.13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan	162 desa	4.190.000.000	162 desa	4.190.000.000	0	0%

				Pemerintahan Desa	pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa						
					Jumlah desa tertib pengelolaan aset	162 desa		162 desa		0	0%
					Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa	1 desa		1 desa		0	0%
2.13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	150.000.000	4 dokumen	150.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000		
2.13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	3.260.000.000	2 dokumen	3.260.000.000	100.000.000	3,07%
2.13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	25.000.000	162 orang	25.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	25.000.000	2 laporan	25.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 laporan	50.000.000	40 laporan	50.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	70.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	50.000.000	162 orang	50.000.000	0	0%
2.13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	10.000.000	177 dokumen	10.000.000	0	0%
2.13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	80 persen	8.767.600.000	80 persen	8.767.600.000	0	0%
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100 persen		100 persen		0	0%
2.13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	8.767.600.000	1 kegiatan	8.767.600.000	0	0%
2.13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	90.000.000	0	0%

				Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
2.13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	5.437.600.000	1 lembaga	5.437.600.000	0	0%
2.13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	0	0%
2.13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	40.000.000	1 laporan	40.000.000	0	0%
2.13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 laporan	2.175.000.000	5 laporan	2.175.000.000	0	0%
2.13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	0	0%

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan DISPERMADES, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan DISPERMADES, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 3.3
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran DISPERMADES Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	5	5	5
2	Kegiatan	11	10	10
3	Subkegiatan	47	45	45
4	Jumlah Dana	24.274.451.596	19.322.951.596	19.422.951.596

Sumber : DISPERMADES, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

- 1) Ada penambahan dana sebesar Rp. 100.000.000,- pada Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dikaenakan Pemerintah Daerah harus mengadakan dan membayar appraisal atas sewa tanah Kas Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo, yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- 2) Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2025

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di DISPERMADES, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi DISPERMADES.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan DISPERMADES Tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
- 2) Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
- 3) Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai DISPERMADES, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
- 4) Perubahan Renja DISPERMADES Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
- 5) Perubahan Rencana Kerja DISPERMADES Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

